LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 89 **TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN PENELAHAAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK PAKAIAN DINAS DAN KAIN TRADISIONAL

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : Bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Pakaian Dinas dan Kain Tradisional, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelahaan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Pakaian Dinas dan Kain Tradisional.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK PAKAIAN DINAS DAN KAIN TRADISIONAL.
KESATU	:	Menetapkan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Pakaian Dinas dan Kain Tradisional dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN HASIL TELAHAAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PAKAIAN DINAS DAN KAIN TRADISIONAL

NOMOR : 89 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 APRIL 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Dalam rangka meningkatkan disiplin dan motivasi kerja, maka pengadaan pakaian dinas beserta atributnya sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk pendukung bagi terselenggaranya peningkatan kedisiplinan tersebut. Selain hal tersebut, pakaian dinas juga menjadi identitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Terhadap hal tersebut, maka diperlukan Pengadaan Pakaian Dinas dan Kain Tradisional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Bahwa Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut juga mengatur terkait jenis Pakaian Dinas dan atributnya serta model dari Pakaian Dinas tersebut.

Pengadaan Pakaian dinas tersebut juga diamanatkan pada Surat Edaran Bersama antara LKPP dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung penyediaan Pakaian Dinas dan Kain Tradisional yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Pakaian Dinas dan Kain Tradisional.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Pakaian Dinas dan Kain Tradisional bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1.	Nama Etalase Produk	:	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional
2.	Latar Belakang Usulan Produk	:	☑ Amanat Peraturan Perundang-undangan ☑ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik ☑ kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog ☐ Usulan dari Pelaku Usaha ☐ Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
3.	Nama Instansi Pengelola Katalog	:	Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produk Pakaian Dinas dan Kain Tradisional untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II

PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:
1. Kategori Pakaian Dinas Pemerintah Daerah
   - ☑ Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
   - ☐ Distributor/Agen
2. Kategori Pakaian Dinas Kementerian/Lembaga
   - ☑ Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
   - ☐ Distributor/Agen
3. Kategori Bahan Pakaian
   - ☑ Produsen/Principal
   - ☑ Distributor/Agen
4. Kategori Atribut dan/atau Kelengkapan Pakaian Dinas
   - ☑ Pedagang Eceran

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha
1. Kategori Pakaian Dinas Pemerintah Daerah dan Kategori Pakaian Dinas Kementerian/Lembaga
   a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
   b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
      1) KBLI 14111 (Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil); atau
      2) KBLI 14120 (Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan);
   c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
   d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
   e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
   f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
      1) Biaya Produksi;
      2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
      3) Biaya Pengiriman;
      4) *Overhead* dan Keuntungan; dan

5) Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

2. Kategori Bahan Pakaian
   a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
   b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
      1) KBLI 131 (Industri Tekstil);
      2) KBLI 13121 (Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya);
      3) KBLI 13122 (Industri Kain Tradisional Tenun Ikat);
      4) KBLI 13133 (Industri Pencetakan Kain Tradisional);
      5) KBLI 13134 (Industri Batik);
      6) KBLI 13999 (Industri Tekstil Lainnya YTDL);
      7) KBLI 14131(Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil); atau
      8) KBLI 46411 (Perdagangan Besar Tekstil).
   c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
   d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
   e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
   f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
      1) Biaya Produksi;
      2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
      3) Biaya Pengiriman;
      4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
      5) Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan

      Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

3. Kategori Atribut dan/atau Kelengkapan Pakaian Dinas
   a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
   b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
      1) KBLI 46413 (Perdagangan Besar Alas Kaki);

2) KBLI 46414 (Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil);
3) KBLI 47834 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang);
4) KBLI 47833 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya);
5) KBLI 47832 (Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian); atau
6) KBLI 47713 (Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian).

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
   1) Biaya Produksi;
   2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
   3) Biaya Pengiriman;
   4) *Overhead* dan Keuntungan; dan
   5) Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan

   Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Produk yang ditawarkan adalah:
1. Pakaian Dinas Pemerintah Daerah (Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lengkap (PDL), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, Pakaian Olahraga)
2. Pakaian Dinas Kementerian/Lembaga (Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lengkap (PDL), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, Pakaian Olahraga)
3. Bahan Pakaian (Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lengkap (PDL), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, Pakaian Olahraga, Kain Tradisional)
4. Atribut dan/atau Kelengkapan Pakaian Dinas (Atribut yang terdiri dari Tanda Jabatan, Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, Papan Nama, Nama Perangkat Daerah, Nama Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Lambang Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Tanda Pengenal dan

Kelengkapan yang terdiri dari Tutup Kepala, Jaket, Ikat Pinggang, Sepatu Hitam/Putih/PDL yang digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas

Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROFIL ETALASE PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Kategori
Pakaian Dinas Pemerintah Daerah	Pakaian Dinas Harian (PDH)	-
	Pakaian Dinas Lengkap (PDL)	-
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-
	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-
	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	-
	Pakaian Olahraga	-
Pakaian Dinas Kementerian /Lembaga	Pakaian Dinas Harian (PDH)	-
	Pakaian Dinas Lengkap (PDL)	-
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-
	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-
	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	-
	Pakaian Olahraga	-
Bahan Pakaian	Pakaian Dinas Harian (PDH)	-
	Pakaian Dinas Lengkap (PDL)	-

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Kategori
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-
	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-
	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	-
	Pakaian Olahraga	-
	Kain Tradisional	-
Atribut dan/atau Kelengkapan Pakaian Dinas	Atribut	Tanda Jabatan
		Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
		Papan Nama
		Nama Perangkat Daerah
		Nama Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
		Lambang Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
		Tanda Pengenal
	Kelengkapan	Tutup Kepala
		Jaket
		Ikat Pinggang
		Sepatu Hitam/Putih/PDL yang digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas

B. Atribut Produk

1. Kategori Pakaian Dinas Pemerintah Daerah
   a. Nama Produk;
   b. Merek;
   c. Nomor Produk Penyedia;
   d. Unit Pengukuran;
   e. Jenis Produk;
   f. Kode KBKI;
   g. Nilai TKDN (%);
   h. Nilai BMP (%);
   i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
   j. Masa berlaku produk;
   k. Hasil Uji Laboratorium;
   l. Model Pakaian Dinas (Pria/Wanita);
   m. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek);
   n. Model Bawahan Pakaian Dinas (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang);
   o. Warna Pakaian;
   p. Ukuran Pakaian;
   q. Jenis Bahan;
   r. Warna/Corak/Motif;
   s. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
   t. Komponen Harga; dan
   u. Keterangan Lainnya.

2. Kategori Pakaian Dinas Kementerian/Lembaga
   a. Nama Produk;
   b. Merek;
   c. Nomor Produk Penyedia;
   d. Unit Pengukuran;
   e. Jenis Produk;
   f. Kode KBKI;
   g. Nilai TKDN (%);
   h. Nilai BMP (%);
   i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
   j. Masa berlaku produk;
   k. Hasil Uji Laboratorium;
   l. Model Pakaian Dinas (Pria/Wanita);
   m. Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek);
   n. Model Bawahan Pakaian Dinas (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang);
   o. Warna Pakaian;
   p. Ukuran Pakaian;
   q. Jenis Bahan;
   r. Warna/Corak/Motif;
   s. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
   t. Komponen Harga; dan
   u. Keterangan Lainnya.

3. Kategori Bahan Pakaian
   a. Nama Produk;
   b. Merek;
   c. Nomor Produk Penyedia;
   d. Unit Pengukuran;
   e. Jenis Produk;
   f. Kode KBKI;
   g. Nilai TKDN (%);
   h. Nilai BMP (%);
   i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
   j. Masa berlaku produk;
   k. Hasil Uji Laboratorium;
   l. Jenis Bahan;
   m. Warna/Corak/Motif;
   n. Ukuran Bahan;
   o. Komponen Harga; dan
   p. Keterangan Lainnya.

4. Kategori Atribut dan/atau Kelengkapan Lainnya
   a. Nama Produk;
   b. Merek;
   c. Nomor Produk Penyedia;
   d. Unit Pengukuran;
   e. Jenis Produk;
   f. Kode KBKI;
   g. Nilai TKDN(%);
   h. Nilai BMP (%);
   i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
   j. Masa berlaku produk;
   k. Bahan;
   l. Komponen Harga; dan
   m. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk
   ☐ Nasional
   ☐ Provinsi
   ☑ Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk
   ☐ Menampilkan Stok Produk
   ☑ Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim
   ☐ Ya
   ☑ Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

☐ Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

☑ Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Kategori Pakaian Dinas Pemerintah Daerah dan Kategori Pakaian Dinas Kementerian/Lembaga

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: lembar, pcs, buah, pasang
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)
11	Hasil Uji Laboratorium	Wajib Diisi	1. Berisi keterangan "Memiliki" apabila memiliki Hasil Uji Laboratorium dan mengunggah hasil uji ke lampiran produk 2. Berisi keterangan "Tidak Memiliki" apabila tidak memiliki Hasil Uji Laboratorium
12	Model Pakaian Dinas (Pria/Wanita)	Wajib Diisi	Berisi informasi model pakaian. Misal: pria, wanita
13	Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)	Wajib Diisi	Berisi informasi model lengan pakaian. Misal: panjang, pendek
14	Model Bawahan Pakaian Dinas (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)	Wajib Diisi	Berisi informasi model bawahan. Misal: celana panjang, rok, rok panjang
15	Ukuran Pakaian	Wajib Diisi	Berisi informasi ukuran pakaian, misal: disesuaikan kebutuhan atau standar ukuran: S, M, L, XL, dst
16	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi jenis bahan pakaian, misal: katun, toyobo

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
17	Warna/Corak/Motif	Wajib Diisi	Berisi keterangan warna/ corak/motif dari produk yang ditawarkan
18	Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang ditawarkan (apabila ada)
19	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya produksi (apabila ada); b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. *Overhead* dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

B. Kategori Bahan Pakaian

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: lembat, pcs, buah, pasang, meter Panjang, dll.
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
11	Hasil Uji Laboratorium	Wajib Diisi	1. Berisi keterangan "Memilik" apabila memiliki Hasil Uji Laboratorium dan mengunggah hasil uji ke lampiran produk 2. Berisi keterangan "Tidak Memiliki" apabila tidak memiliki Hasil Uji Laboratorium
12	Jenis Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis bahan dari produk yang ditawarkan
13	Warna/Corak/Motif	Wajib Diisi	Berisi informasi warna/corak/ motif Kain Tradisional yang ditawarkan
14	Ukuran Bahan	Wajib Diisi	Berisi ukuran bahan pakaian, misal: 3 meter, 4 meter
15	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya produksi (apabila ada); b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. *Overhead* dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

C. Kategori Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar,

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: lembat, pcs, buah, pasang
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)
11	Bahan	Wajib Diisi	Berisi informasi Bahan dasar dari produk yang ditawarkan
12	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya produksi (apabila ada); b. Biaya pengemasan (apabila ada);

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			c. Biaya pengiriman; d. *Overhead* dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

GATOT PAMBUDHI POETRANTO